



**PIDATO  
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA  
PADA  
RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA  
DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN JAWABAN  
ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Oleh :

**Heru Budi Hartono  
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Kamis, 8 Agustus 2024**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
*Om Swastiastu, Namo Buddhaya,* Salam kebajikan.

- Yth. - Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - Hadirin yang saya hormati.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka *Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.*

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,**

Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Raperda ini.

Eksekutif berusaha menanggapi seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi, dukungan, dan saran yang disampaikan, perkenankan saya

menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan terhadap materi yang bersifat teknis, dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, kiranya dapat dibahas pada kesempatan berikutnya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif terhadap Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan yang saya hormati,**

Pada **bagian pertama**, Eksekutif akan menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal yang menjadi perhatian, terkait penanganan banjir, kemacetan, sampah, bantuan sosial dan penanganan stunting.

- **Terkait penanganan banjir**, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh *Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB-PPP dan Fraksi PSI*,

Eksekutif berkomitmen untuk melakukan penanganan banjir sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, yaitu:

1. Target untuk membangun dan/atau revitalisasi 16 Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) secara bertahap pada tahun 2024.
2. Melaksanakan program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir.
3. Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat serta sinkronisasi program-program, diantaranya sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian PUPR.
4. Menambah daya tampungan air dan tangkapan limpasan air Sungai, bersinergi dengan Pemerintah Daerah penyangga dalam upaya penanggulangan banjir di Jakarta, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

- Terkait **penanganan kemacetan**, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan oleh *Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB-PPP dan Fraksi PSI*, disampaikan bahwa:
  1. Dalam program pengendalian kemacetan, strategi yang komprehensif tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah melalui *push and pull strategy*. *Push strategy* merupakan kebijakan yang mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih kepada angkutan umum, seperti:
    - a. penerapan kebijakan ganjil genap,
    - b. penerapan pengendalian lalu lintas secara elektronik atau *Intermediate Traffic System (ITS)*,
    - c. penertiban lalu lintas, dan
    - d. penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir;

sedangkan *Pull Strategy* merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain:

- a. pengembangan jaringan transportasi (MRT, LRT, BRT),
  - b. peningkatan sarana transportasi
  - c. pemberian subsidi transportasi,
  - d. peningkatan keselamatan transportasi, dan
  - e. peningkatan integrasi transportasi.
- Terkait **Penanganan Sampah**, menanggapi pertanyaan dari *Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB-PPP*, Eksekutif berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengolahan sampah agar lebih ramah lingkungan, minim dampak sosial, dan lebih ekonomis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka terhadap inovasi teknologi pengolahan sampah yang dapat membantu tercapainya tujuan tersebut. Dengan mengadopsi teknologi yang lebih canggih dan berkelanjutan, Jakarta dapat memperkuat posisinya sebagai kota global yang mendukung investasi, kreativitas, dan lingkungan melalui sinergi dengan berbagai pihak

demi mewujudkan solusi pengolahan sampah yang lebih efektif dan efisien.

- Terkait **pemberian bantuan sosial** berupa KJP, KJMU, KAJ, KPDI dan KLJ, dapat disampaikan bahwa:
  1. Menanggapi saran *Fraksi Partai NasDem*, terkait penyalahgunaan penggunaan dana bantuan KJP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang mengatur penggunaan dana bantuan KJP.
  2. Menanggapi saran *Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai PDI Perjuangan* terkait pengalokasian anggaran KJP, KJMU, KAJ, KPDI dan KLJ, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pepaduan data penerima manfaat melalui verifikasi data DTKS dan P3KE agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan adil.

- Terkait **penanganan stunting** sebagaimana disampaikan oleh *Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Partai PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra*, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan penanganan sebagai berikut:
  1. Intervensi spesifik melalui edukasi dan pemantauan tumbuh kembang, pemberian asupan gizi tambahan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) kepada balita, kelompok ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri.
  2. Intervensi sensitif melalui program sanitasi yang baik berupa program desa/kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), program perbaikan lingkungan tempat tinggal, dan program penyediaan air bersih.

## **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Pada **bagian kedua**, Eksekutif menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan **Pendapatan Daerah**.

- Menanggapi pertanyaan dan pendapat *Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PSI dan Fraksi PKS* terkait potensi penerimaan pajak daerah, dapat disampaikan bahwa berkurangnya target Pajak Daerah karena Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian target pajak daerah pada Perubahan APBD 2024, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
  1. Kebijakan pemberian insentif fiskal untuk:
    - a. PBB-P2 berupa pembebasan pokok untuk NJOP dibawah 2 miliar rupiah, keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 berdasarkan Pergub Nomor 16 Tahun 2024;

- b. Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame berlaku sampai dengan tahun 2025;
  - c. Pengenaan BBN-KB II sebesar 0% pada periode semester 2 tahun 2024.
2. Adanya penurunan tarif Pajak Parkir dari semula 20% menjadi 10% sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. PBJT Jasa Hiburan diperkirakan turun karena terjadi *shifting*/pergeseran ke PBJT Jasa makanan dan minuman; dan
  4. Penjualan kendaraan bermotor roda empat secara nasional mengalami penurunan hingga 19,43% secara YoY pada periode Januari sampai dengan Juni 2024.

Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah.

- Menanggapi pertanyaan dan pendapat dari *Fraksi Partai PKS* terkait Deviden, disampaikan bahwa **Eksekutif sependapat** agar BUMD senantiasa didorong untuk memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi namun juga finansial berupa pemberian deviden kepada Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik saham. Pendapatan deviden juga berkaitan dengan penugasan kepada BUMD untuk menjalankan misi pelayanan publik dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- Menanggapi pertanyaan dan pendapat dari *Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai PKS* terkait Pendapatan Transfer, **Eksekutif sependapat dengan Fraksi Partai NasDem** bahwa koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih dioptimalkan.

Berkenaan dengan **transparansi Dana Bagi Hasil**, sesuai Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminta

informasi penetapan Dana Bagi Hasil yang menjadi Pendapatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Menanggapi *Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat*, disampaikan bahwa peningkatan target penerimaan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat bersumber dari rencana penarikan Dana *Treasury Deposit Facilities* (TDF). Dana TDF dimaksud bersumber dari peningkatan realisasi penerimaan DBH atas penetapan alokasi tahun anggaran sebelumnya oleh Pemerintah Pusat dan selanjutnya ditempatkan pada rekening Bank Indonesia.

Bahwa penganggaran atas penggunaan Dana TDF sesuai ketentuan perundang-undangan dapat dilakukan antara lain melalui mekanisme penganggaran pada Perubahan APBD, sehingga target penerimaan pendapatan transfer mengalami kenaikan yang cukup besar.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Pada **bagian ketiga**, terkait dengan **Belanja Daerah**, disampaikan sebagai berikut:

- Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Golkar* terkait evaluasi lokasi titik distribusi pangan murah yang menerima subsidi di seluruh wilayah DKI Jakarta, dapat disampaikan bahwa dalam menentukan lokasi distribusi pangan bersubsidi telah mempertimbangkan lokasi yang terdekat dengan wilayah potensi masyarakat rentan rawan pangan sehingga dapat dijangkau oleh penerima manfaat.
- Menanggapi pertanyaan *Fraksi Golkar dan Fraksi PSI* terkait percepatan penyerapan tenaga kerja, telah dilakukan Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri terkait, yaitu:
  1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kolaborasi, Pelatihan Kewirausahaan, Pemagangan di perusahaan maupun Penyerapan atau Penempatan Lulusan Pelatihan Kerja pada Dunia Usaha dan Dunia Industri.
  2. Bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk sistem informasi pasar kerja.

- Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Demokrat* terkait Honor Jumentik, Posyandu dan Dasawisma, disampaikan bahwa pemberian uang operasional/honorarium berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Menanggapi *Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB-PPP* tentang sekolah gratis, disampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian yang mencakup kebutuhan anggaran, dasar hukum pelaksanaan, dan mekanisme penatausahaan anggaran serta pertanggungjawaban. Berkaitan dengan percepatan implementasi sekolah gratis, pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan perlu dipercepat, sehingga implementasi Sekolah Gratis dapat segera dilaksanakan.
- Menanggapi pendapat *Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan* terkait Pengangkatan Guru Honorer Menjadi Kontrak Kerja Individu (KKI), disampaikan bahwa proses rekrutmen pegawai KKI akan dilakukan melalui Seleksi/Tes untuk mendapatkan calon pegawai yang memiliki

kompetensi dan pengetahuan bagi kemajuan pelayanan pendidikan di masa mendatang.

- Menanggapi pendapat *Fraksi PKS* terkait Kebutuhan Sarana Prasana Olahraga dan Rencana Pembangunan GOR Mampang Prapatan, Eksekutif terus berkomitmen memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga bagi masyarakat DKI Jakarta.
- Menanggapi pendapat *Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PSI* terkait peningkatan layanan kesehatan, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut melalui pembangunan dan/atau peningkatan kelas pada fasilitas kesehatan dilaksanakan melalui Rencana Jangka Panjang, antara lain:
  - a. Proses perencanaan pembangunan RSUD Cakung;
  - b. Proses perencanaan peningkatan Kelas RSUD Pasar Minggu menjadi Tipe A khusus Kanker; dan
  - c. Proses perencanaan peningkatan Kelas RSUD menjadi RSUD Tipe B.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Pada **bagian keempat**, Eksekutif menanggapi pandangan umum Fraksi yang berkaitan dengan **Pembiayaan Daerah**.

Menanggapi pertanyaan dari *Fraksi PAN, Fraksi PSI dan Fraksi Partai Demokrat* mengenai Penyertaan Modal Daerah (PMD), sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penambahan PMD dapat dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan. Saat ini, pemberian PMD dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan asas kebutuhan, manfaat, efektivitas serta kemampuan perusahaan.

**Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,**

Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian penyampaian jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.***

Saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan atas perhatian terhadap penjelasan yang telah disampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan **Sukses Jakarta untuk Indonesia.**

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namó Buddhaya.*

Jakarta, 8 Agustus 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Hari Budi Hartono